

GEPOLITIK CHINA DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Edta Muhammad Fadilah

Edtajn@gmail.com

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Al-Ghifari

Abstract

Asia Tenggara adalah salah satu kawasan di Asia Pasifik yang memiliki nilai strategis tinggi khususnya di mata RRC. Bukan hanya secara ekonomi karena keberadaan dari berbagai titik strategis jalur perdagangan maritim tetapi juga di bidang militer sebagai daerah penyangga bagi terciptanya China yang kuat. Menurut analisa geopolitiknya, secara politik maupun sosial Kawasan ini memiliki kedekatan dengan RRC. Keterhubungan diantara keduanya tercipta oleh sejarah panjang dinamika kekaisaran Chian dengan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Pada masa kini hal tersebut tidak menghilang begitu saja, bahkan RRC terlihat ingin membangkitkan keterhubungan itu kembali sesuai tingkat yang pernah ada di masa lalu. Tulisan ini akan menggunakan metode analisa geopolitik untuk membahas hubungan antara China dengan Kawasan di Asia Tenggara untuk menggali lebih jauh faktor-faktor yang membangun kondisi tersebut.

Key words: Asia Pasifik, Asia Tenggara, China, Geopolitik, Metode Analisa Geopolitik

Pendahuluan

Asia Tenggara merupakan bagian strategis dari kawasan Asia Pasifik. Selat Malaka, yang memiliki nilai ekonomi dan strategis tinggi, merupakan jalur pelayaran vital yang setara dengan Terusan Suez, Terusan Panama, dan Selat Hormuz (Rodrigue & Notteboom, 2021). Kawasan Asia Tenggara diisi oleh 11 negara yang mayoritasnya tergolong sebagai negara berkembang, hanya Singapura yang tergolong negara maju. Perekonomian negara-negara tersebut juga masih banyak bergantung kepada hasil alam dan penjualan barang mentah. Meskipun begitu kawasan ini memiliki potensi besar secara ekonomi karena menjadi pusat dari beberapa komoditas barang tambang yang sangat berguna bagi industri diataranya emas, perak, tembaga, minyak bumi, gas alam, timah, bauksit, tungsten, batu bara, mangan, dan bijih besi (Putri, 2020). Populasi Asia Tenggara juga tergolong besar, terutama karena menjadi rumah bagi Indonesia, negara dengan populasi terbanyak ke-4 di dunia.

Prospek wilayah Asia Tenggara yang menguntungkan telah menarik RRC untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. China telah mengalami kemajuan ekonomi yang pesat setelah hampir tiga dekade menjalankan kebijakan reformasi dan

pembukaan yang dimulai oleh Perdana Menteri Deng Xiaoping (Ikenberry, 2008). Kebangkitan China sebagai kekuatan baru di Asia ini sebenarnya tidak begitu asing, karena dalam sejarahnya China pernah menjadi pusat peradaban Asia dengan doktrin Tianxia yang mengklaim peran sebagai penguasa tunggal dunia yang ditunjuk oleh dewa langit (Dreyer, 2015). Di masa lalu, beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaka, Kedah, Kelantan, Tanah Merah, Siam, Sulu, Vietnam, dan Funan (Kamboja), menjadi daerah vassal kekaisaran China, mencerminkan kedekatan kultural kedua wilayah tersebut.

Pada masa kini hal yang tidak jauh berbeda terjadi. China yang kuat akan menginginkan untuk menghadirkan kembali peran lamanya sebagai hegemon Asia (Kissinger, 2014, pp. 179-181). Untuk mencapai hal tersebut setidaknya terdapat 2 kebijakan dari RRC yang dapat dilihat yakni kebijakan OBOR (*One Belt One Road Initiative*) dan kebijakan 'sembilan garis putus-putus'. Kebijakan OBOR sendiri diluncurkan pada tahun 2013, dan merupakan upaya China untuk membangkitkan kembali jalur sutra perdagangan baik di daratan maupun laut. Kebijakan ini melibatkan banyak negara dalam berbagai kerjasama ekonomi bersama China termasuk juga negara-negara Asia Tenggara yang krusial bagi jalur perdagangan laut. Kebijakan ini ditekan dalam konferensi diplomasi Peripheri, dimana Presiden Xi Jinping mengeluarkan pernyataan yang menarik. Ia mengatakan menjaga stabilitas wilayah negara tetangga China merupakan objek utama dari diplomasi peripheri. Hasil yang diinginkannya adalah berpartisipasi dalam integrasi ekonomi regional dan menciptakan tatanan ekonomi regional baru (Wangxin & Qian, 2013). Menurut beberapa ahli hal ini merupakan tanda yang nyata bagi keinginan dari RRC untuk mengambil peran pemimpin bagi negara-negara tetangganya dengan memasukan mereka dibawah naungan China (Cai, 2017).

RRC terlibat masalah sengketa dengan negara-negara Asia Tenggara karena kebijakan "sembilan garis putus-putusnya" (Thayer, 2014). Pada tahun 2014, China mengeluarkan aturan pemancingan baru di wilayah tersebut yang membuat persengketaan semakin serius karena RRC dengan tegas melakukan klaim wilayah secara sepihak dengan mengandalkan hukum nasional (Thayer, 2014). Amerika Serikat juga turut memperkeruh hubungan antara RRC dan negara-negara tetangganya. Meskipun demikian, hubungan dagang antara China dan negara-negara di Asia Tenggara justru meningkat, menunjukkan kesuksesan kebijakan One Belt One Road (OBOR) di kawasan

ini. Pada tahun 2020, Asia Tenggara menjadi mitra dagang terbesar bagi China, menggantikan posisi sebelumnya yang dipegang oleh Uni Eropa (Harada, 2020).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut peneliti melihat diperlukan adanya analisa geopolitik terhadap hubungan China dengan Asia Tenggara untuk memahami alasan keunikan hubungan yang dimiliki keduanya. Penelitian diharapkan dapat menjadi acuan untuk menentukan kebijakan bagi mereka pengambil kebijakan yang bersangkutan dengan isu ini serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan mengenai hirauan geopolitik khususnya mengenai negara RRC dan kawasan Asia Tenggara.

Tinjaun Pustaka

Geopolitik

Teori geopolitik modern dikembangkan pertama kali oleh Friedrich Ratzel, yang melihat pertumbuhan negara seperti pertumbuhan organisme, memerlukan "lebensraum" (ruang hidup) yang memadai untuk berkembang (Cohen, 2015, p. 17). Ratzel berpendapat bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewartahi pertumbuhannya, dan negara yang unggul akan bertahan dan berlanjut. Jika ruang hidup negara terbatas, batas-batas negara dapat diperluas melalui cara damai atau perang (Cohen, 2015, p. 25). Teori Ratzel kemudian mengilhami dua aliran pemikiran, yaitu fokus kekuatan darat dan fokus kekuatan laut.

Kjellen menganggap negara sebagai organisme hidup yang memiliki intelektualitas, dan negara memerlukan ruang untuk pertumbuhan dan kekuatan rakyatnya (Cohen, 2015, pp. 24-25). Untuk mempertahankan kelangsungannya, negara harus meningkatkan kekuatan nasionalnya dan menguasai kekuatan maritim. Alfred Thayer Mahan, seorang perwira Angkatan Laut Amerika dan sejarawan, mengembangkan teori geopolitik dengan pendekatan terhadap kekuatan maritim yang dikenal sebagai *sea power doctrine*. Teori ini menekankan pentingnya dominasi di wilayah laut untuk mencapai kekuatan politik dan ekonomi yang kuat (Crowl, 1986). Penguasaan lokasi strategis di *choke point* laut, kanal, dan tempat pengisian batu bara menjadi krusial dalam mencapai tujuan ini (Crowl, 1986). Oleh karena itu, peningkatan produksi dan kapasitas perkapalan menjadi penting dalam situasi damai, dan teori *sea power* dari Mahan mempengaruhi perlombaan senjata di laut.

Selain itu, perkembangan teknologi penerbangan di awal abad ke-20 membawa teori wawasan dirgantara atau kekuatan udara dalam teori geopolitik. Sir John Slessor,

Marsekal Udara dari Angkatan Udara Kerajaan Inggris, menyatakan bahwa kekuatan udara merupakan suplemen penting bagi kekuatan darat dan laut untuk menangkal invasi tanpa perlu mengerahkan senjata nuklir (Slessor, 1957, pp. 264-285). Wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu arena krusial dalam konsep penggabungan kekuatan tiga angkatan ini.

Keterhubungannya teori-teori geopolitik diatas dengan penelitian ini adalah RRC nampaknya tengah mempraktikan setiap teori diatas melalui kebijakan-kebijakannya terhadap Kawasan Asia Tenggara selama ini. Khususnya kebijakan terkait Laut China Selatan yang merupakan penerapan dari teori lebensraum (kebijakan penetapan sembilan garis putus-putus) serta wawasan dirgantara (kebijakan pembangunan pangkalan militer di *fiery cross reef*). Begitu juga dengan program OBOR di wilayah Asia Tenggara juga merupakan penerapan dari *sea power doctrine* yang digunakan untuk mengamankan jalur-jalur pelayaran bagi perdagangan internasionalnya.

Metode Analisa Geopolitik

Terdapat banyak metode analisa geopolitik diantaranya *analysis of power method*, *historical method*, *morphological method*, *functional method*, *behavioral method*, dan *systemic method* (Martin, 2015). Setiap metode memiliki caranya masing-masing dalam menganalisa geopolitik. Metode *analysis of power* membagi kekuatan nasional kedalam lima unsur yang akan dianalisa yakni geografi, ekonomi, politik, sosial, dan militer (Hartshorne, 1954). *Historical method* adalah metode melihat sejarah sebagai sesuatu yang dipertimbangkan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan geografi politik. Sesuatu yang terjadi sekarang merupakan konsekuensi dari peristiwa-peristiwa di masa lalu. *Morphological method* adalah metode analisa geopolitik yang mengacu kepada analisa terhadap struktur politik serta asosiasinya yang terdapat di dalam negara, blok kawasan, atau organisasi internasional, mengingat kepada lokasi, ukuran, dan bentuk. *Functional method* menganalisis fungsi suatu daerah sebagai unit politik, ia membagi wilayah politik menjadi area sub-ordinat yang membangun hubungan politik dengan keseluruhan area sub-ordinat yang berbeda dan area yang berada di luar itu. *Behavioral method* menganalisa perilaku individu yang ada di suatu wilayah kemudian mengaitkannya dengan ruang atau lokasi dimana ia berada. Analisa ini sulit untuk dapat menghasilkan perilaku yang dianggap bersifat kolektif kecuali dalam area yang dikontrol. Terakhir, *systemic method* berasal dari *general theory of system* yang merupakan sebuah

perspektif metodologi yang berusaha mempelajari sesuatu secara utuh yang sebenarnya berasal dari berbagai bidang yang berbeda (Martin, 2015, pp. 1041-1045). Penelitian ini hanya menggunakan metode Analysis of Power dan Historical method dikarenakan keterbatasan waktu dari penelitian ini sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (Subagyo et al., 2023) dengan metode analisis data menggunakan studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Menurut Danial dan Warsiah Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Danial & Warsiah, 2009). Sementara Nazir menilai Studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian.

Pada penelitian ini literatur yang akan digunakan baik berupa buku, jurnal, artikel, dokumen, maupun website dari media terpercaya atau aktor terkait. Sedangkan data-data yang akan dicari diantaranya, (1) peta dan penjelasan geografis (seting spasial) China dan Kawasan Asia Tenggara; (2) Data perdagangan antara RRC dan Asia Tenggara; (3) Sejarah hubungan antara China dengan Asia Tenggara; (4) Data mengenai keterikatan kultur antara bangsa China dan bangsa-bangsa di Asia Tenggara; (5) Data Kekuatan militer RRC dan penempatannya di wilayah Asia Tenggara

PEMBAHASAN

Setting dan Konteks Spasial: Negara Republik Rakyat China dan Kawasan Asia Tenggara

Republik Rakyat China adalah negara terbesar keempat di dunia dengan luas wilayah 9.596.960 km² (the World Fact Book, CIA, 2021). Negara ini memiliki isu sengketa wilayah dengan negara-negara tetangganya di sepanjang perbatasannya. Sengketa terjadi di bagian timur dengan Taiwan dan Jepang, serta di bagian utara dengan Uni Soviet pada tahun 1969 yang kemudian diselesaikan pada tahun 2004 dengan transfer

wilayah dari Russia kepada China. Sengketa wilayah juga terjadi di wilayah barat daya dengan Nepal dan India, terutama di wilayah Aksai Chin, Kashmir. Selain itu, China memiliki sengketa wilayah laut dengan negara-negara Asia Tenggara di Laut China Selatan, di mana China mengklaim sebagian besar wilayah ini dengan kebijakan "Sembilan garis putus-putus."

Laut China Selatan memiliki luas sekitar 3.625 juta kilometer persegi dan menjadi area penting dalam hubungan antara China dengan kawasan Asia Tenggara. Terdapat gugusan pulau di laut ini yang menjadi pusat kontestasi dari negara-negara di sekitarnya, seperti Kepulauan Paracel dan Spratly. China mengklaim kepemilikan pulau-pulau tersebut dengan mengacu pada peta lama yang digunakan oleh pemerintahan Kuomintang pada tahun 1947. Sengketa ini menimbulkan ketegangan dengan negara-negara Asia Tenggara yang berusaha membawa isu ini ke arbitrase internasional, namun China menolak untuk berpartisipasi.

Kedua pulau, Paracel dan Spratly, memiliki nilai strategis bagi pertahanan dan ekonomi China. Penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut dapat mempengaruhi keamanan dan perdagangan China. Mekong, sebagai sungai terpanjang keenam di Asia, juga menjadi sumber penghidupan bagi ratusan juta orang di enam negara yang terhubung oleh sungai ini. China awalnya tidak ikut terlibat sepenuhnya dalam kawasan transnasional ini, namun semenjak 2008, China menjadi ikut andil secara keseluruhan dalam kerjasama tersebut, terutama karena peningkatan nilai perdagangan dan investasi China di kawasan tersebut.

Berdasarkan konteks geografi diatas dapat diketahui China memiliki hubungan baik di daratan maupun lautan dengan Kawasan Asia Tenggara. Hubungan ini sebenarnya sudah ada semenjak berabad-abad lalu. Ia terikat melalui hubungan sejarah politik, sosial, dan ekonomi yang panjang. Tidak heran apabila dapat dikatakan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan 'halaman belakang' dari China mengingat jarak dan keterhubungannya satu sama lain.

Sejarah China di Kawasan Asia Tenggara

Hubungan antara China dan kawasan Asia Tenggara sudah berlangsung selama dua ribu tahun dengan sistem upeti yang dipaksakan oleh China, yang dikenal sebagai tatanan sinosentris atau *tributary system* (Fairbank, 1968, pp. 1-3). Sistem ini memaksa kerajaan-kerajaan Asia Tenggara membayar upeti sebagai bentuk perlindungan dari

kekaisaran China. Sistem ini mengharuskan kerajaan-kerajaan membayarkan sejumlah harta kepada kekaisaran China sebagai ganti dari perlindungan terhadap mereka.

Terdapat 3 aspek utama dari cara pandang China terhadap dunia untuk dapat memahami hubungan sejarah antara China dengan kawasan Asia Tenggara (Fox, 2004, pp. 125-126). *Pertama*, umat manusia dipercaya merupakan bagian dari sebuah struktur sosial yang bersifat hierarkis dimana Kaisar China sebagai anak langit (*Son of Heaven*) adalah pemimpinnya. *Kedua*, kehendak langit adalah tuntunan moral absolut sehingga struktur sosial diharuskan mengikuti dan merefleksikannya sebagaimana harmoni kosmos ilahi. Masyarakat haruslah berfungsi secara harmonis sebagaimana alam. *Ketiga*, peradaban China dianggap paling superior ketimbang peradaban lainnya. Dapat dipahami bahwa dalam pandangan dunia tersebut Kaisar China bukan hanya sebagai penguasa kekaisarannya tetapi seluruh alam semesta. Oleh karena itu kemudian pandangan sebagai China sebagai peradaban superior muncul dengan sendirinya. Semua bangsa selain China adalah kaum barbar yang diharuskan menghormati kekuasaan China melalui ritual penyerahan upeti. Sehingga di masa lalu ketika China akan melakukan hubungan apapun dengan bangsa lain bahkan perdagangan, kerajaan bersangkutan diharuskan mengirimkan upeti terlebih dahulu sebagai tanda ketundukan terhadap sang ‘anak langit’ (Fox, 2004, p. 127).

Pada masa kekuasaan dinasti Han, hubungan antara China dan kawasan Asia Tenggara dimulai dengan pedagang China menjadikan wilayah ini sebagai kawasan transit sebelum berdagang ke India. Kekaisaran Han juga membuka hubungan dengan kerajaan Funan di Kamboja, Burma, Laos, Thailand, dan Vietnam (Fox, 2003, pp. 26-36). Selanjutnya, pada masa kekaisaran Ming, armada Laksamana Cheng ho mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara dan memamerkan kekuatan kekaisaran China serta menerima upeti dari kerajaan-kerajaan tetangga. Beberapa raja Asia Tenggara bahkan mengunjungi langsung Istana Kekaisaran untuk memperkuat hubungan upeti (Gungwu, 1968, p. 57). Kerajaan Champa, Siam, Jawa, Malaka, dan Samudra memiliki nilai penting bagi Kekaisaran China, baik dalam aspek ekonomi maupun strategis (Gungwu, 1968, p. 59).

1402-1424	Champa	Cambodia	Siam	Java	Brunei	Malacca	Samudra
Missions from China	14	3	11	9	3	11	11
Missions to China	18	7	21	17	9	12	11

Gambar 1. Data jumlah kunjungan oleh dan ke- Kekaisaran China dari 7 kerajaan Utama di Asia Tenggara di tahun 1402-1442. Sumber: (Gungwu, Early Ming Relations with South East Asia: a Background Essay , 1968, p. 58)

Setelah dinasti Ming runtuh pada tahun 1644, dinasti baru Qing berkuasa dan mencoba memperluas wilayahnya. Kerajaan-kerajaan Asia Tenggara seperti Burma dan Vietnam memerangi upaya ekspansi Qing, tetapi akhirnya gagal karena kekuatan Qing yang lebih besar. Namun, pada abad ke-18, kekuasaan Qing mulai melemah karena kekalahan dalam perang dan masuknya bangsa Eropa ke kawasan tersebut (Fox, 2003, pp. 108-115). Akhirnya, Qing runtuh pada tahun 1912.

Berdasarkan sejarah tersebut dapat dipahami bahwa China dan kawasan Asia Tenggara memiliki sejarah keterhubungan yang panjang (Apriliani et al., 2022). Entitas-entitas politik di kawasan tersebut pernah menjadi bagian dari tata dunia dibawah kekaisaran China untuk waktu yang panjang. Kehadiran kekuatan asing meruntuhkan tata dunia tersebut, sehingga dapat dimengerti apabila terdapat ambisi RRC untuk kembali membawa kawasan Asia Tenggara kedalam lingkup pengaruhnya seperti dulu dan membalas bangsa-bangsa Eropa yang pernah mempermalukannya.

Diaspora China di Kawasan Asia Tenggara

Migrasi penduduk China ke Asia Tenggara telah terjadi selama berabad-abad. Pada masa awal dinasti kekaisaran China, ekspansi geopolitik diikuti oleh perpindahan penduduk, terutama komunitas pantai sebelah tenggara China (Mathew, 2012, pp. 352-354). Migrasi ini juga dipengaruhi oleh invasi bangsa Mongol dan pembentukan komunitas China di wilayah asing. Dalam era modern, emigrasi China ke Asia Tenggara mengalami empat periode, termasuk masa migrasi besar-besaran setelah kekalahan Qing dalam perang Opium (Kuhn, 2006, p. 164). Pada masa itu, banyak imigran China dipekerjakan sebagai buruh dan pedagang di daerah koloni bangsa Eropa, membentuk komunitas yang berperan dalam perdagangan dan ekonomi di kawasan tersebut. Masa Revolusi Asia melihat perubahan politik dan identitas bagi komunitas China yang tinggal di wilayah kolonial yang dikuasai oleh negara pribumi (Mathew, 2012, p. 355). Pada masa

kini, migrasi China ke kawasan lain seperti Amerika Utara dan Australia juga meningkat (Kuhn, 2006, p. 165).

Countries	1997			2009		
	N	%	Rank	N	%	Rank
Indonesia	7,310,000	22.0	1	7,834,000	19.9	1
Thailand	6,358,000	19.1	2	7,178,000	18.2	2
Malaysia	5,445,100	16.4	3	6,479,000	16.4	3
USA	2,597,000	7.8	4	4,178,000	10.6	4
Singapore	2,311,300	7.0	5	2,756,000	7.0	5
Canada	1,001,000	3.0	8	1,332,000	3.4	6
Philippines	1,030,000	3.1	7	1,190,000	3.0	7
Vietnam	1,145,850	3.4	6	1,136,000	2.9	8
Burma	959,100	2.9	10	1,090,000	2.8	9
Peru	540,150	1.6	11	987,000	2.5	10
Australia	372,000	1.1	12	734,000	1.9	11
Japan	234,264	0.7	15	681,000	1.7	12
Russia	1,000,283	3.0	9	495,000	1.3	13
Cambodia	300,000	0.9	13	350,000	0.9	14
England	250,000	0.8	14	335,000	0.8	15
France	225,000	0.7	16	233,000	0.6	16
Brazil	127,700	0.4	19	244,000	0.6	17
Laos	160,000	0.5	18	197,000	0.5	18
India	167,777	0.5	17	155,000	0.4	19
New Zealand	111,308	0.3	21	149,000	0.4	20
Italy	60,600	0.2	22	170,000	0.4	21
Holland	127,500	0.4	20	113,000	0.3	22
South Africa	31,000	0.1	23	109,000	0.3	23
Total (23 countries)	31,804,332	95.69		37,903,000	96.05	
Total (all countries)	33,238,000	100.00		39,463,000	100.00	

Gambar 2. 23 Negara dengan jumlah populasi Diaspora China tertinggi. Sumber: (Li & Li, 2013, p. 23)

Berdasarkan data, tiga negara Asia Tenggara yakni Indonesia, Thailand, dan Malaysia masing-masing memiliki diaspora penduduk China terbanyak di dunia. Ditambah lagi Singapura, Filipina, Vietnam, Burman, Kamboja, serta Laos juga memiliki populasi diaspora China yang tidak kalah banyak. Dapat diketahui bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan dengan populasi diaspora China terbanyak di dunia. Jumlah tersebut terkadang membuat dinamika politik tersendiri bagi beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura yang jumlah etnis pribumi (melayu) dan etnis tionghoanya tidak jauh berbeda (Bhattacharya, 2009, pp. 120-125).

Selain penduduk migrasi-migrasi tersebut juga sekaligus membawa adat istiadat berserta budaya bangsa China. Seorang sejarawan Wang Gungwu, bukti sejarah menunjukkan bahwa kemanapun komunitas China pergi mereka akan berusaha untuk mempertahankan otonomi budaya yang mereka miliki (Gungwu, 2000, p. 117). Dalam masyarakat multikultural seperti di kebanyakan negara-negara kawasan Asia Tenggara, otonomi kultural ini diberikan secara luas sehingga mereka merasa lebih loyal kepada negara dimana mereka tinggal dibandingkan dengan RRC sendiri. Pengambilalihan kekuasaan oleh kaum komunis di daratan China sebenarnya memiliki dampak terhadap

para diaspora yang semakin menjauhkan diri mereka terhadap tanah airnya. Hal ini terjadi karena nilai-nilai konfusius yang mereka anut tidak berkesesuaian dengan paham maoisme RRC. Namun kebangkitan China lewat modernisasi RRC meningkatkan semangat nasionalisme bangsa China di seluruh dunia. Nasionalisme ini juga sebenarnya adalah produk dari *a century of humiliation* yang dirasakan oleh bangsa China akibat kekalahannya dari bangsa Barat (Bhattacharya, 2009, pp. 140-141). Dengan memanfaatkan nasionalisme tersebut RRC mungkin dapat menarik loyalitas dari diaspora yang tersebar di negara-negara Asia Tenggara salah satunya dengan mempermudah aktifitas perekonomian negara tersebut di tempat para diaspora itu tinggal.

Perdagangan dan Jalur Sutra Laut Maritim

Alfred Thayer Mahan menekankan bahwa penguasaan laut dan jalur perdagangan dunia sangat penting untuk menguasai kekayaan dunia. Kawasan Asia Tenggara, terutama Selat Malaka, Teluk Benggala, dan Laut China Selatan, memiliki posisi krusial karena menjadi bagian dari Jalur Sutra Maritim yang menghubungkan China, India, Arab, dan Afrika selama ribuan tahun. Saat ini, Selat Malaka dan Laut China Selatan tetap menjadi jalur perdagangan strategis dengan banyak kapal yang melewatinya setiap hari, membawa minyak dan barang dagangan (Shaofeng, 2010). Selat Malaka merupakan chokepoint dunia, dan kapal-kapal dapat memilih rute alternatif melalui Selat Sunda atau Selat Lombok. Mayoritas perdagangan China dilakukan melalui jalur laut, khususnya

Rank	Year	Chinese Entity / Project	Cost US\$	Sector	Subsector (where applicable)	Country of investment
1	2017	Kuala Lumpur–Kota Bharu Rail (Construction)	14,300,000,000	Transport	Rail	Malaysia
2	2013	Preah Vihear–Kaoh Kong Railway	9,600,000,000	Transport	Rail	Cambodia
3	2017	Vanke, Hopu, Hillhouse, Bank of China	9,060,000,000	Logistics		Singapore
4	Unclear	Kyaukpadaung Deep Sea Port (Construction)	7,300,000,000	Transport	Ports/ Shipping	Myanmar
5	2015	China General Nuclear	5,960,000,000	Energy		Malaysia
6	2016	Vientiane–Boten Railway Project	5,800,000,000	Transport	Rail	Laos
7	2017	Bangkok to Nakhon Ratchasima High-Speed Railway (Phase 1)	5,352,905,500	Transport	Rail	Thailand
8	2013	Zhejiang Hengyi	3,440,000,000	Energy	Oil	Brunei
9	2017	China Railway Engineering	3,190,000,000	Transport	Rail	Indonesia
10	2017	China Railway Construction, China Railway Engineering	2,690,000,000	Transport	Rail	Thailand

yang dilakukan dengan Uni Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Material utama yang dibutuhkannya ialah minyak, dimana China sebagai pusat manufaktur dunia memerlukan hingga 60.6 Mtoe (*Megatone of oil equivalent*) minyak mentah di tahun 2007. Kemajuan

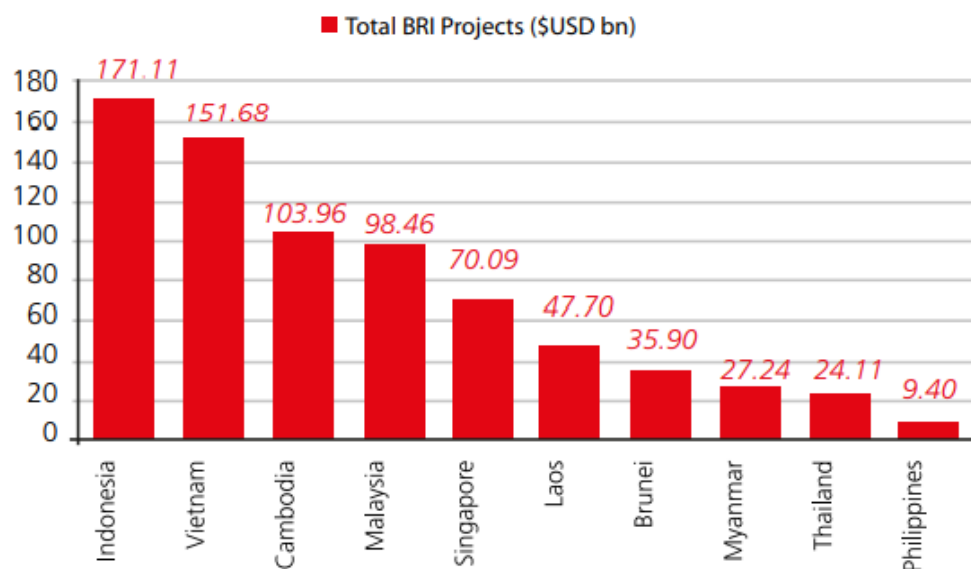
industri yang pesat membuat pertumbuhannya terhadap kebutuhan minyak mencapai 60 persen nilai global pada tahun 2006 (Shaofeng, 2010, pp. 4-6). Dapat dipahami bahwa RRC pasti akan berusaha untuk mengamankan jalur laut perdagangan tersebut melalui kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara yang menjadi perlintasannya.

Gambar 3. 10 *Proyek terbesar BRI di ASEAN.* Sumber: (Majid & Jie, 2018)

China sebelumnya menguasai jalur perdagangan di kawasan Asia Tenggara, tetapi hubungan tersebut terputus selama kemunduran dinasti Qing dan masa perang dingin. Pada tahun 1960-1970an, hubungan antara China dan negara-negara Asia Tenggara tidak stabil karena perseteruannya dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat. Namun, setelah perang dingin usai dan krisis finansial Asia pada tahun 1997, China menjadi fokus perhatian dunia karena perekonomiannya yang kuat. Krisis finansial tersebut digunakan oleh China sebagai strategi untuk membangun kembali ikatan ekonomi dengan kawasan Asia Tenggara.

Pada tahun 2005, Presiden RRC, Hu Jintao, mengunjungi tiga negara Asia Tenggara dan menegaskan tiga unsur kebijakan China yang menjadi pendekatan terhadap kawasan tersebut yakni menjadi ‘tetangga’ yang baik, stabil, dan kaya (artinya dapat diandalkan) (Chen, 2007) . Pendekatan itu masih digunakan dan menjadi juga menjadi dasar bagi Presiden Xi Jinping dalam pidatonya di tahun 2013 untuk merumuskan kebijakan BRI (*Belt and Road Initiative*) atau OBOR (*One Belt One Road Initiative*), dimana negara-negara kawasan Asia Tenggara yang menjadi ‘tetangga’ dekat memiliki nilai strategis bagi kepentingan RRC. Kerjasama BRI kebanyakan berupa pembangunan proyek-proyek infrastruktur, logistik, dan fasilitas penunjang perdagangan lainnya.

Berdasarkan data diketahui bahwa hingga tahun 2017 berbagai proyek BRI yang bernilai miliaran US dollar dikerjakan yang mana kebanyakan adalah proyek infrastruktur transportasi khususnya di bidang perkeretaapian. Indonesia, Vietnam, dan Kamboja menjadi negara utama kerjasama proyek BRI dengan nilai total tertinggi nyaris menyentuh 180 miliar US dollar



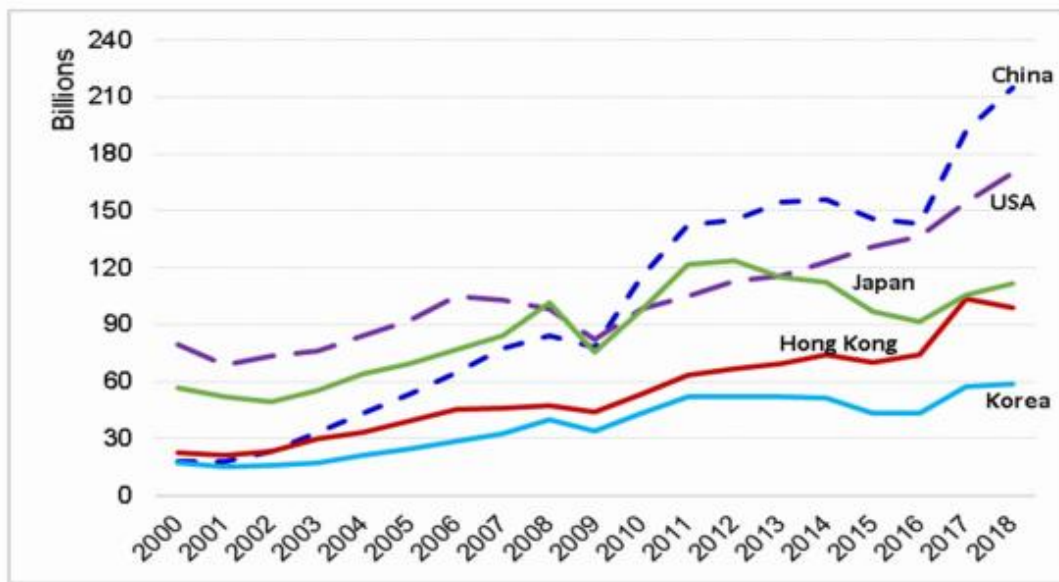
Gambar 4. Total Proyek BRI di Negara Anggota ASEAN. Sumber: (Majid & Jie, 2018)

Dengan menggunakan kebijakan BRI nya China bukan hanya berhasil membuat negara-negara di Kawasan Asia Tenggara menjadikannya salah satu partner ekspor komoditas perdagangan terbesar tetapi juga membuat neraca perdagangan yang menguntungkan bagi negaranya sendiri.

	¹ Exports to World (US\$B)					² Exports to China (US\$B)					Share of Exports to China (%)				
	2000	2005	2010	2015	2018	2000	2005	2010	2015	2018	2000	2005	2010	2015	2018
Brunei Darussalam	3.9	6.2	8.9	6.4	6.6	0.06	0.19	0.60	0.09	0.24	1.4	3.0	6.8	1.5	3.7
Cambodia	1.4	3.1	5.1	8.5	12.7	0.06	0.04	0.13	0.71	1.35	4.4	1.2	2.6	8.3	10.7
Indonesia	65.4	87.0	157.8	150.4	180.2	3.24	7.13	16.50	16.10	28.10	4.9	8.2	10.5	10.7	15.6
Lao PDR	0.3	0.6	1.7	3.7	5.3	0.00	0.01	0.73	1.45	1.61	0.7	2.5	41.6	39.8	30.4
Malaysia	98.2	141.6	198.6	200.0	247.5	3.13	9.61	26.40	27.90	36.10	3.2	6.8	13.3	14.0	14.6
Myanmar	1.6	3.8	8.7	11.4	16.7	0.04	0.07	0.77	4.64	4.93	2.7	2.0	8.9	40.6	29.6
Philippines	38.1	41.3	51.5	58.8	69.3	1.09	7.52	8.97	10.90	13.30	2.9	18.2	17.4	18.5	19.2
Singapore	137.8	229.6	351.9	351.6	413.0	5.31	16.80	32.10	43.20	44.30	3.8	7.3	9.1	12.3	10.7
Thailand	69.0	110.9	193.3	214.3	253.0	3.16	9.34	22.00	24.50	31.00	4.6	8.4	11.4	11.4	12.3
Vietnam	14.5	32.4	72.2	162.1	243.7	1.51	2.78	6.67	16.50	53.80	10.4	8.6	9.2	10.2	22.1

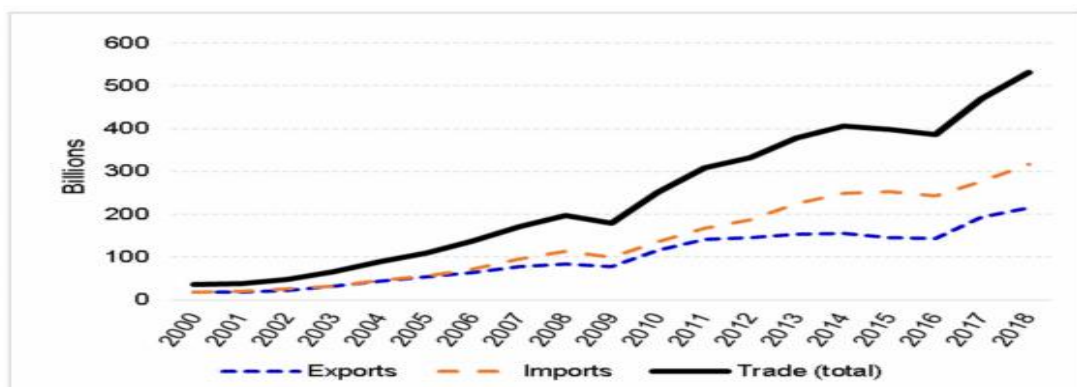
Gambar 5. Ekspor negara-negara ASEAN ke China dan Dunia 2000,2005,2010,2015,2018. Sumber: (Alleyne, Zhang, & Mu, 2020)

Terlihat pada data tersebut bahwa ekspor negara-negara ASEAN mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2000 sampai 2018 baik ke dunia internasional maupun ke China sendiri. Namun tingkat ekspor ke China sendiri terutama bagi negara Vietnam telah mengambil presentase yang cukup besar dari keseluruhan ekspor negara tersebut.



Gambar 6. 5 Tujuan Ekspor Tertinggi negara ASEAN (2000-2018). Sumber: (Alleyne, Zhang, & Mu, 2020)

Pada tahun 2010, China menjadi tujuan utama bagi ekspor negara-negara ASEAN mengalahkan Amerika Serikat, Jepang, Hong kong, dan Korea. Posisi ini terus dipertahankan meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2016.



Gambar 7. Ekspor dan Import ASEAN dengan China (2008-2018). Sumber: (Alleyne, Zhang, & Mu, 2020)

Segala bentuk perdagangan tersebut sebenarnya sangat menguntungkan bagi China karena terlihat dari neraca perdagangan tersebut impor dari negara-negara ASEAN terhadap dagangan China selalu lebih besar ketimbang Ekspornya. Sehingga kemudian dalam hal ini dapat dipahami bahwa sejauh ini RRC telah berhasil mempengaruhi negara-negara ASEAN secara ekonomi yang mana membuat mereka bergantung kepadanya baik sebagai tujuan Ekpor komoditas yang mereka miliki maupun Impor komoditas yang mereka perlukan. Sebagai lahan basah perekonomian China, tentu saja ia perlu melindungi kepentingan-kepentingannya di kawasan tersebut salah satunya dengan menggunakan instrumen militer.

Kekuatan Militer RRC dan Kawasan Asia Tenggara

Kawasan Asia Tenggara secara tradisional menjadi daerah *buffer zone* dimana pengaruh China dan negara-negara barat beradu. Dalam sejarahnya diketahui bahwa kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara adalah bagian dari sistem upeti yang kemudian terlepas akibat kolonialisasi bangsa Eropa. Begitu juga selama Perang Dingin, dimana Amerika Serikat menggunakan strategi *containment*-nya untuk mengurung komunis China melalui dukungan terhadap pembentukan ASEAN dan pahamnya yang anti-komunis. Oleh karena itu kemudian menjadi sesuatu yang logis apabila China menggunakan kekuatan militernya untuk meningkatkan pengaruh yang ia miliki di kawasan tersebut.

Pada tahun 2015 PLA menjadi kekuatan militer terkuat ketiga didunia, dibawah Amerika Serikat dan Russia. Meskipun begitu jumlah pasukan aktif dari militer China ini merupakan paling banyak di dunia, berada di angkat 3 juta prajurit aktif (International Institute of Strategic Studies, 2020, p. 259). Ditambah lagi militerisasi yang dilakukan belakang ini menjadikan China sebagai negara dengan pengeluaran militer terbanyak kedua setelah Amerika Serikat. Pada tahun 2016, China melakukan reformasi militer yang mengubah susunan struktur organisasi sekaligus kepemimpinan dalam PLA (Lin, 2016). Hal yang menarik adalah pengenalan sistem *theater command* atau komando kewilayahan yang terbagi menjadi 5 buah komando yang berbeda yakni (1) *Eastern Theater Command* mencakup pesisir timur China dengan markas di Nanjing; (2) *Western Theater Command*, mencakup wilayah barat hingga ke Xinjiang dengan markas di

Chengdu; (3) *Northern Theater Command*, melindungi perbatasan utara dengan Mongolia, Russia, Korea, serta semenanjung Shadong dengan markas di Qindao; (4) *Southern Theater Command*, wilayah selatan yang berbatasan dengan Vietnam, Laos, Myanmar serta Laut China Selatan dengan markas di Guangzhou (5) *Central Theater Command*, tepat di tengah daratan China dengan markas di Beijing. Menurut perspektif operasional militer, pembagian berdasarkan wilayah tempur tersebut dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan operasi gabungan karena setiap wilayah dapat berfungsi sebagai kesatuan otonom yang memiliki memiliki kelengkapan baik kekuatan darat, laut dan udara (Lin, 2016). Sehingga dapat dikatakan bahwa kini PLA telah menjadi militer yang lebih efektif untuk melakukan operasi gabungan.

Namun begitu apabila menyangkut kawasan Asia Tenggara maka kekuatan militer yang paling disoroti adalah angkatan laut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada kawasan ini tersimpan kepentingan nasional RRC khususnya jalur sutra maritim yang menjadi urat nadi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan sejarah sebenarnya di masa lalu telah ada upaya China untuk memperkuat angkatan lautnya. Namun hal tersebut selalu gagal akibat campur tangan kekuatan asing (kebangkitan Jepang akhir tahun 1800an) dan kurangnya pengalaman China sendiri dalam melakukan operasi militer di laut.¹

Pada tahun 2015 China mengeluarkan *white paper* berjudul *China Military Strategy* yang didalamnya mengarisbawahi strategi *active defense* bagi kekuatan angkatan lautnya. Strategi *active defense* adalah gabungan dari konsep pertahanan lepas pantai dan perlindungan laut terbuka (Poulin, 2016). Strategi ini menekankan bahwa pendekatan tradisional China untuk lebih mementingkan daratan ketimbang lautan sudah ditinggalkan dan mereka mulai melihat pentingnya kontrol terhadap lautan untuk melindungi kepentingan maritimnya. Penerapan dari strategi ini telah terlihat dimana kapal-kapal militer RRC kini sudah terbiasa beroperasi jauh dari garis pantainya dan dalam waktu yang semakin lama di laut lepas (Poulin, 2016). Kepemilikan China terhadap Kapal Induk juga semakin memperjelas keinginannya untuk menjadi hegemon di Asia dimana Kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah pengaruhnya. Kapal Induk

¹ Kekalahan pada armada Beiyang pada perang *Sino-France* (1884-1885) dan *Sino-Japan* pertama (1894-1895)

adalah satu-satunya kapal yang dapat memberikan *naval power projection*² jarak jauh karena kemampuannya untuk membawa pesawat tempur dalam jumlah besar dan biasa menjadi kapal bendera dari suatu armada tempur. Diproyeksikan dengan agresifitas pembangunan angkatan lautnya, pada tahun 2030 China dapat menjadi negara dengan kekuatan kapal induk terkuat di dunia, mengalahkan Amerika Serikat (Childs, 2018).

Hingga hari ini belum ada satupun pangkalan militer RRC yang dibangun di kawaasan Asia Tenggara kecuali pada pulau asli dan buatan di kepulauan Spratly. Namun berdasarkan laporan dari Pentagon, Beijing diduga ingin membangun pangkalan diluar negeri untuk memberikan dukungan logistik bagi angkatan lautnya agar dapat memproyeksikan kekuatan militer jarak jauh (Office of the Secretary of Defense of United States of America, 2020, p. 10). Menariknya laporan ini menyebutkan 5 negara Asia Tenggara yang kemungkinan besar menjadi calon lokasi pangkalan militer tersebut diantaranya Kamboja, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dari kelima tersebut Kamboja adalah yang paling mungkin karena pemutusan kerjasama program keamanan maritim dengan Amerika Serikat (Cheang, 2020).

Dalam aspek kekuatan militer, Kawasan Asia Tenggara menjadi subjek sekaligus objek dari China. Sebagai subjek, Kawasan Asia Tenggara dipandang merupakan wilayah yang pengaruhnya semakin signifikan seiring kemajuan China sehingga ia kemudian meningkatkan kekuatan militernya baik dalam hal peralatan maupun doktrin militer agar dapat diproyeksikan lebih jauh dari sekedar kekuatan pertahanan di dalam negeri semata. Sebagai objek ia merupakan kawasan yang wajib berada di bawah pengaruh China apabila ia hendak menjadi kekuatan hegemon di Asia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut analisa geopolitik, secara geografis China dan Kawasan Asia Tenggara saling terhubung karena memiliki kedekatan jarak sehingga terdapat kepentingan berkaitan yang hanya dapat diselesaikan melalui kerjasama antara keduanya. Menurut sejarahnya mereka terhubung baik secara politik melalui ikatan tata dunia di bawah kekaisaran China yang berlangsung

² Kemampuan suatu negara untuk menyebarkan dan mempertahankan pasukan militer diluar wilayah teritorial negaranya sendiri melalui kekuatan laut (U.S. Department of Defense, 2013).

selama ratusan tahun serta sosial budayanya yang merupakan hasil dari persebaran diaspora yang dihasilkan oleh migrasi. Kawasan ini memiliki titik-titik strategis jalur perdagangan yang menjadi urat nadi bagi perekonomian RRC sehingga kemudian mendorong negara tersebut untuk berinvestasi di bidang militernya untuk mendorong dan menjaga Asia Tenggara tetap berada di bawah pengaruhnya. Akhir kata tidak mengherankan apabila Kawasan Asia Tenggara dikatakan sebagai ‘halaman belakang’ RRC karena berbagai kepentingan yang terkandung didalamnya, ia merupakan batu loncatan awal apabila negara ini ingin menyaingi dominasi hegemoni Amerika Serikat khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Daftar Pustaka

- Apriliani, D., Hasanah, I. U., & Komalia, M. (2022). PUTUS HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA KOREA UTARA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Global Mind*, 4(2), 61–69.
- Subagyo, A., IP, S., Kristian, I., IP, S., & Kom, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.
- Alleyne, A., Zhang, Z., & Mu, Y. (2020). Sustaining International Trade with China: Does ACFTA Improve ASEAN Export Efficiency? *Sustainability*, 2-26.
- Bhattacharya, A. (2009). the Chinese Diaspora in Southeast Asia: Chinese Nationalism Reinforced. *Diaspora Studies*, 119-142.
- Cheang, S. (2020, October 7). *US expresses concern over China link to Cambodian base*. Retrieved from AP news: <https://apnews.com/article/phnom-penh-china-archive-cambodia-united-states-3b64c35c0234895b7d0c29d8cdf912c4>
- Cohen, S. B. (2015). *Geopolitics: The Geograpy of International Relations 3rd edition*. London: Rowman & Littlefield.
- Crowl, P. (1986). Alfred Thayer Mahan: The Naval Historian. In P. A., & G. F., *Makers of Modern Strategy from Machiavelli to Nuclear Age* (pp. 444-480). Princeton: Princeton University Press.
- Dreyer, J. T. (2015). The ‘Tianxia Trope’: will China change the international system? *Journal of Contemporary China*, 1015-1031.
- Fairbank, J. K. (1968). A Preliminary Framwork, Sinosentrism and its problem. In J. K. Fairbank, *World Order: China Foreign Relations* (pp. 1-19). Cambridge: Cambridge University Press.
- Fox, M. S. (2003). *a Short History of China and South East Asia: Tribute, Trade, and Influence*. Crows Nest: Allen & Unwin.

- Fox, M. S. (2004). South East Asia and China: The Role of History and Cultrue in Shaping Future Relations. *Contemporary South East Asia*, 116-139.
- Godwin, P. (1987). Changing Concepts of Doctrine, Strategy and Operations in the Chinese People's Liberation Army 1978-87. *the China Quarterly*, 572-590.
- Gungwu, W. (1968). Early Ming Relations with South East Asia: a Background Essay . In J. K. Fairbank, *World Order: China's Foreign Relations* (pp. 34-62). Cambridge: Cambridge University Press.
- Gungwu, W. (2000). *The Chinese Overseas: From Earthbound China to the Quest of Autonomy*. Cambridge : Harvard University Press.
- Harada, I. (2020, July 15). *ASEAN becomes China's top trade partner as supply chain evolves*. Retrieved from Nikkei: <https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/ASEAN-becomes-China-s-top-trade-partner-as-supply-chain-evolves>
- Hartshorne, R. (1954). Political Geography. In R. Hartshorne, & J. Preston, *American Geography: Inventory and Prospect* (pp. 167-223). Syracuse: University Press.
- Ikenberry, G. J. (2008, January). *The Rise of China and the Future of the West*. Retrieved from Foreign Affairs: <https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2008-01-01/rise-china-and-future-west>
- International Institute of Strategic Studies. (2020). *The Military Balance 2020*. London: Routledge.
- Kissinger, H. (2014). *World Order*. New York: Viking-Penguin.
- Kuhn, P. A. (2006). Why China Historians Should Study the Chinese Diaspora and Vice-Versa. *Journal of Chinese Overseas*, 163-172.
- Lai, W. L. (1999). Demographic Changes. In L. Pan, *the Encyclopedia of the Chinese Overseas* (pp. 53-54). Cambridge : Harvard University Press.
- Li, P. S., & Li, E. X. (2013). The Chinese Oversea Population. In T. Che-Beng, *Routledge Handbook of the Chinese Diaspora* (pp. 15-28). New York: Routledge.
- Lin, Y. Y. (2016, March 7). *The Implications of China's Military Reforms*. Retrieved from the Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/03/the-implications-of-chinas-military-reforms/>
- Majid, T. S., & Jie, Y. (2018). *China's Belt and Road Initiative (BRI) and Southeast Asia*. Kuala Lumpur: CIMB Southeast Asia Research Sdn Bhd.
- Martin, M. A. (2015). Method for the Analysis of Geopolitical Regions (MARG). *Journal of the Spanish Institute for Strategic Studies*, 1036-1079.
- Mathew, P. A. (2012). In Search of El Dorado: Chinese Diaspora in Southeast Asia. *China Report*, 351-364.
- National Development and Reform Commision, PRC. (2008). *Country Report on China's Participation in Greater Mekong Subregion Cooperation*. Beijing: National Development and Reform Commision, PRC.

- Nazir. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Office of the Secretary of Defense of United States of America. (2020). *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2020*. Office of the Secretary of Defense.
- Poulin, A. (2016, April 15). *Going Blue: The Transformation of China's Navy*. Retrieved from the Diplomat: <https://thediplomat.com/2016/04/going-blue-the-transformation-of-chinas-navy/>
- Putri, A. S. (2020, June 18). *Faktor Ketersediaan Sumber Daya Alam di Negara ASEAN*. Retrieved from Kompas: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/18/200000669/faktor-ketersediaan-sumber-daya-alam-di-negara-asean?page=all>
- Qu, X., & Meng, Q. (2015). *The Economic Importance of the Straits of Malacca and Singapore: An Extreme Scenario Analysis*. Singapore: Department of Civil and Environmental Engineering, National University of Singapore.
- Rodrigue, J.-P., & Notteboom, T. (2021). *Port Economics, Management and Policy*. New York: Routledge.
- Shaofeng, C. (2010). China's Self-Extrication from the 'Mallaca Dillema' and Implication. *International Journal of China Studies* China's Self-Extrication from, 1-24.
- Slessor, J. (1957). *the Great Deterrent*. New York: Praeger.
- Tai, W. P., & Soong, J. J. (2014). Trade Relations Between China and Southeast Asia: Strategy and Challenge. *the Chinese Economy*, 23-39.
- Thayer, K. (2014, January 13). *China's New Fishing Regulations: An Act of State Piracy?* Retrieved from the Diplomat: <https://thediplomat.com/2014/01/chinas-new-fishing-regulations-an-act-of-state-piracy/>
- the World Fact Book, CIA. (2021, March 15). *China*. Retrieved from CIA.gov: <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/china/>
- U.S. Department of Defense. (2013). *The Dictionary of Military Terms*. New York: Skyhorse Publishing.
- Wade, G. (2005). The Zheng He Voyages: a Reassessment. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society* , 37-58.
- Wangxin, & Qian, Z. (2013, October 26). *Xi Jinping: China to further friendly relations with neighboring countries*. Retrieved from people.cn: <http://en.people.cn/90883/8437410.html>